

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN
MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP *EFFECTIVE TAX RATE (ETR)*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2010-2013)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

PRAWIRA PUTRI C.I SITUMORANG

NIM. 12030111130020

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Prawira Putri C.I Situmorang
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130020
Fakultas/Jurusan : Ekonomika/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN
DAN MEKANISME *CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP *EFFECTIVE
TAX RATE (ETR)*
(Studi empiris pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia
tahun 2010-2013)**

Dosen Pembimbing : Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, Macc, Akt.

Semarang, 12 Maret 2015

Dosen Pembimbing

(Dr. P. Basuki HadiPrajitno, MBA, Macc, Akt.)

NIP. 19610109 198803 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Prawira Putri C.I Situmorang

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130020

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN
DAN MEKANISME *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP *EFFECTIVE TAX*
RATE (ETR) (Studi empiris pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2010-2013)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 26 Maret 2015.

Tim Penguji:

1. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MAcc, Akt. (.....)
2. Dr. Endang Kiswara, S.E, M.Si, Akt. (.....)
3. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Prawira Putri C.I Situmorang, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKIAN DAN MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *EFFECTIVE TAX RATE* (ETR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2013)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemungkinan terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 12 Maret 2015

Yang membuat pernyataan,

(Prawira Putri C.I Situmorang)

NIM : 120301111130020

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of ownership structure and corporate governance mechanisms to Effective Tax Rate (ETR). This research is a replication with modification of the research Mahenthiran (2012), where the difference with previous research is the study was conducted in Indonesia. The dependent variable in this study is the Effective Tax Rate (ETR) and the independent variable is proxied by the ownership structure of institutional ownership and managerial ownership. Corporate governance mechanisms are proxied by the board size, the size of the independent directors, the size of the board of directors.

The population of this research was all companies listed in Indonesia Stock Exchange (ISX) 2010-2013. Sample of this research was all of manufacturing company which listed at Indonesia Stock Exchange (ISX) 2010-2013. The study sample consisted of 30 total samples and 120 total observations of the manufacturing company's financial statements Data Analysis was performed with hypothesis testing used multiple regression analysis. Statistic program in this study used SPSS 20.

The results showed that managerial ownership, size of the board of directors, independent directors and the size of the size of the board of directors did not have effect on the Effective Tax Rate (ETR). Institutional ownership has a significant influence on the Effective Tax Rate (ETR). This study found that the ownership structure and corporate governance mechanism have less effect on the effective tax rate (ETR).

Keywords : *Effective Tax Rate, ownership structure, corporate governance mechanisms, institutional ownership, managerial ownership, size of the board of commissioners, size of the board of independent commissioners, size of the board of directors*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Penelitian ini merupakan replika dan modifikasi dari penelitian Mahenthiran (2012), dimana perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan di Indonesia. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Effective Tax Rate* (ETR) dan variabel independennya adalah Struktur kepemilikan diproksikan oleh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. mekanisme *corporate governance* yang diproksikan oleh ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi.

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Sampel penelitian adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Sampel penelitian terdiri dari 30 total sampel dan 120 total observasi dari laporan keuangan perusahaan manufaktur. Analisis data dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda. Program statistik dalam penelitian menggunakan SPSS 20.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, Ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* cukup minim dalam mempengaruhi besaran effective tax rate (ETR).

Kata kunci : *Effective Tax Rate*, struktur kepemilikan mekanisme *corporate governance*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, ukuran, ukuran dewan direksi.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Cepat, Senyap dan Tepat

Ask, and it shall be given you; seek, and you will find; knock, and
it shall be opened unto you

Matthew 7 : 7

Saya kerjakan pekerjaan Tuhan, dan biarkan Tuhan yang mengerjakan
pekerjaan saya!

Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan,
melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN semesta alam.

Zakharia 4 : 6

We have nothing to fear for the future, except as we forget the
way Lord has led us, and His teaching in our past history

Ellen G. White

Skripsi ini penulis persembahkan untuk

Tuhan Yesus Kristus

dan

*Keluargaku yang senantiasa hadir
melalui Doa, Dukungan
dan Kepercayaannya*

Papa, Mama, Yudha, Shansion, Ellyne

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan berkat-Nya terkhusus melalui setiap untaian kata dalam skripsi yang dianugerahkan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap *Effective Tax Rate (ETR)* (Studi empiris pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013)”** dapat terselesaikan dengan lancar. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, Msi., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MAcc, Akt. selaku dosen pembimbing atas motivasi, perhatian, bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
4. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt selaku dosen wali yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir studi.
5. Para dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
6. Orangtua tercinta, Kapten. Inf. Drs. Syarif Situmorang dan Vera Diana, untuk kasih sayang yang tak pernah habis, doa yang tak pernah putus, dan setiap dukungan, kepercayaan dan pengorbanannya yang senantiasa hadir.
7. Adik – adikku tersayang, Yudha Pratama Situmorang, Shansion Situmorang

dan Ellyne Darananta Situmorang yang selalu menyediakan lututnya dan melipat tangannya untuk kakak. I have done my part, and I am waiting yours, soon ya!

8. Alm. Oppung Doli untuk setiap doa dan kepercayaannya yang selalu hadir semasa hidup hingga saat ini tetap nyata dalam diri penulis walaupun oppung kini telah tiada dan hal yang sama juga buat oppung boru yang selalu mendoakan penulis.
9. Keluarga Besar Situmorang, terimakasih untuk doa dan dukungannya yang selalu memotivasi penulis.
10. Kelompok tumbuh bersama “Revival”, Kak Ayu Fitaria, Dyah Putri Maharani, Elianna, Amelia Agata dan Nolanda Dwi Karnia yang telah menjadi keluarga kecil semasa perkuliahan, terimakasih telah menjadikan saat – saat yang biasa menjadi istimewa., Aku mengasihi kalian!
11. Sahabat – Sahabat terkasih “Jordan Roll”, Stephanie Kristian, Joice Manurung, Susmawaty, Hillary Meita, Adeline Sibuea. Terimakasih untuk doa, dukungan, dan kebersamaan yang selalu manis. Me love you, guys!
12. Sahabat – sahabat tersayang, Rani, Tia dan Eli. Terimakasih untuk telinga yang selalu mendengar, setiap kata yang selalu menguatkan, setiap doa yang terucap dan untuk selalu ada khususnya selama proses penyelesaian skripsi.
13. Yesaya Danar Putra, untuk waktu, doa dan dukungannya bagi penulis, terimakasih telah membuat segala sesuatunya menjadi lebih indah.
14. Teater OBKIAL, terkhusus rekan selama 2 periode kepengurusan 2012-2014 Kakakku Krisnauli Pakpahan, Maria Carolin, Enny Yulia, Remy Joseph, Gyna Lea, Robby Wijaya, Yonatan, Melvin, Abram, Ondy, Rado, Putri Sinaga, Yosua Martin, Claudia, Debby, Janette Marpaung, Astuti, Yuli, Frans, Mangetar, Ruben, Vijay, Mutiara, Yossi, terimakasih atas

kebersamaan yang mengajarkan banyak hal.

15. Keluarga Mahasiswa Advent Semarang (KMAS). Michael S, Viona Houdy, Stenny, Michael H, Alvhan, Ronggur, Arvin, Edo, Yudhis, Freddy, Jessica, Evelyne, Widya, Fanta, Widi, Tina. Belum ada kata yang mampu mendeskripsikan betapa bahagianya penulis bertemu dengan kalian.
16. Gereja Masehi Advent Hari Ke-7 (GMAHK) Jemaat Mataram, Semarang yang menjadi wadah bagi penulis untuk bertumbuh dalam kasih Tuhan,
17. KKN Kradenan, Kecamatan Srumbung, Magelang. Faiz, Arju, Ajeng, Chalara, Vanesha, Arie, Retno, Erinda dan Amalia. Terimakasih untuk kebersamaan selama 35 hari untuk selamanya, see you on top, guys!
18. PMK FEB UNDIP, angkatan 2009,2010, 2012 terkhusus teman seperjuangan angkatan 2011 Samuel, Andrian, Ricko, Carles, Philip, Randy, Evans, David, Tian, Wisnu, Diori, Yehezkiel, Moses, Paguh, Gio, Doly, Hendra, Axel, Mindo, Cita, Esther, Annauly, Tasya, Paskah dan Santa serta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih untuk kebersamaan selama 3,5 tahun.
19. Kost-an Pondok Putri Ayu, Dewi, Ratna, Renis, Holy, Carol, Yohana, Rani dan terkhusus kak Debora Aritonang terimakasih untuk dukungannya.
20. Teman – Teman Akuntansi 2011, sampai bertemu dikesuksesan.
21. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin

Semarang, 12 Maret 2015

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1. Tujuan Penelitian	11
1.3.2. Manfaat Penelitian	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	14
2.1. Landasan Teori	14
2.1.1. Teori Agensi	14

2.1.2.	<i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	17
2.1.3.	Struktur Kepemilikan	19
	2.1.3.1 Kepemilikan Institusional.....	20
	2.1.3.2 Kepemilikan Manajerial	21
2.1.4	Mekanisme Corporate Governance.....	22
	2.1.4.1 Dewan Komisaris.....	24
	2.1.4.2 Komisaris Independen.....	25
	2.1.4.3 Dewan Direksi	26
2.2.	Penelitian Terdahulu	27
2.3.	Kerangka Pemikiran	28
2.4.	Perumusan Hipotesis.....	30
	2.4.1. Kepemilikan Institusional dan <i>Effective Tax Rate</i>	30
	2.4.2. Kepemilikan Manajerial dan <i>Effective Tax Rate</i>	31
	2.4.3. Ukuran Dewan Komisaris dan <i>Effective Tax Rate</i>	33
	2.4.4. Ukuran Komisaris Independen dan <i>Effective Tax Rate</i> ..	34
	2.4.5. Ukuran Dewan Direksi dan <i>Effective Tax Rate</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN		37
3.1.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasi.....	37
	3.1.1. Variabel Dependen.....	38
	3.1.2. Variabel Independen	39
	3.1.2.1. Kepemilikan Institusional	39
	3.1.2.2. Kepemilikan Manajerial.....	39
	3.1.2.3. Ukuran Dewan Komisaris	40

3.1.2.4. Ukuran Komisaris Independen	40
3.1.2.5. Ukuran Dewan Direksi.....	41
3.2. Populasi dan Sampel.....	41
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	42
3.4. Metode Pengumpulan Data	42
3.5. Metode Analisis Data.....	42
3.5.1. Uji Stastistik Deskriptif.....	42
3.5.2. Analisis Regresi Berganda	43
3.5.3. Uji Asumsi Klasik.....	44
3.5.3.1 Uji Normalitas	44
3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas.....	45
3.5.3.3 Uji Multikolinearitas	46
3.5.3.4 Uji Autokorelasi	46
3.5.4. Pengujian Hipotesis	47
3.5.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	47
3.5.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f).....	48
3.5.4.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	49
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 50
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	50
4.2. Analisis data	51
4.2.1. Analisis Data Deskriptif.....	51

4.2.2. Uji Kualitas Model Regresi	53
4.2.3. Uji Asumsi Klasik.....	53
4.2.3.1 Uji Normalitas	54
4.2.3.2 Uji Heteroskedastisitas	57
4.2.3.3 Uji Multikolinearitas.....	58
4.2.3.4 Uji Autokorelasi	59
4.2.4 Analisis Regresi Berganda	60
4.2.5 Uji Hipotesis	63
4.2.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	63
4.2.5.2 Uji Statistik F	64
4.2.5.3 Uji Statistik t.....	65
4.3. Pembahasan.....	68
BAB V PENUTUP	77
5.1. Kesimpulan.....	77
5.2. Keterbatasan Penelitian	78
5.3. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Variabel, Dimensi, Indikator, Skala Pengukuran.....	37
Tabel 4.1 Ringkasan Sampel Penelitian.....	50
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif	51
Tabel 4.3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	54
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	58
Tabel 4.5 Hasil Uji Durbin-Watson.....	59
Tabel 4.6 Hasil Runs Test	60
Tabel 4.7 Hasil Regresi Berganda	61
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi	64
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F	64
Tabel 4. 10 Hasil Uji Hipotesis	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	29
Gambar 4.1 Grafik Normal P-Plot.....	55
Gambar 4.2 Grafik Histogram.....	56
Gambar 4.2 Grafik Plot.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A Daftar Perusahaan Sampel	85
LAMPIRAN B Hasil Analisis Data	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan alam serta perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat yang kian meningkat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar merupakan suatu objek yang potensial dalam pajak. Pajak adalah salah satu sarana memperoleh sumber tetap untuk pendapatan pemerintah sekaligus merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara Indonesia yang bertujuan untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang kuat yang dilandasi oleh kemandirian pembiayaan negara.

Semakin meningkatnya dana yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan negara, menjadikan peningkatan sumber – sumber pendapatan negara menjadi sebuah keharusan. Besarnya pengaruh penerimaan pajak mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sisi perpajakan. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan pada target penerimaan negara dari sektor perpajakan, yang meliputi pajak, bea dan cukai. Dalam APBN-P 2015, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.489,3 triliun (<http://www.kemenkeu.go.id/>).

Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pemerintah dari sisi perpajakan dengan memberikan dorongan berupa insentif kepada para pengusaha sehingga dapat memacu para pengusaha untuk melakukan aktivitasnya lebih giat. Dorongan pemerintah terkait insentif pajak diatur dalam UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan tahun 2008 yang merupakan

peraturan perpajakan yang mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan kepada badan dan orang pribadi yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Insentif yang diberikan pemerintah berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 berupa penurunan tarif pajak badan dalam negeri dan bentuk penghasilan tetap adalah 28% pada tahun 2009 akan menjadi 25% yang berlaku sejak tahun pajak 2010. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Selain menurunkan tarif pajak, pemerintah telah terus menawarkan berbagai insentif dari tahun ke tahun, tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari lokal maupun luar negeri, tetapi juga untuk memberikan kenyamanan dan mengurangi beban pajak yang dihadapi oleh para pemain baru maupun yang sudah ada di pasar. Pemerintah memberikan penyederhanaan perhitungan pajak yang mulai diberlakukan pemerintah sejak 1 Juli 2013 dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah ini mengatur Wajib Pajak yang memiliki usaha dengan peredaran bruto yang penjualannya tidak lebih dari 4,8 Milyar melakukan penyetoran pajaknya sendiri setiap bulan dengan hanya membayar PPh final sebesar 1% dari omzet bulanan.

Pemberian insentif pajak ini, harapannya akan memberikan keuntungan bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sisi perpajakan. Namun, dari persepsi pembayar pajak, terutama perusahaan – perusahaan, pajak merupakan beban, tidak hanya untuk perusahaan tetapi juga beban bagi pemegang saham untuk itu perusahaan akan berupaya menekan pajak perusahaan untuk meningkatkan arus kas. Sabli dan Noor (2012) menjelaskan bahwa perusahaan akan terlibat dalam strategi perencanaan pajak yang agresif untuk meminimalkan, menghilangkan atau menunda kewajiban pajak. Perusahaan akan melakukan manipulasi terhadap laba perusahaan untuk menghemat beban pajak yang seharusnya dibayarkan, hal ini dikarenakan pajak menyebabkan laba bersih perusahaan akan berkurang karena ditarik ke kas pemerintah melalui pembayaran pajak. Fenomena ini menyiratkan bahwa sesungguhnya adanya rasa tidak senang perusahaan untuk membayar pajak karena dirasa tidak mendapatkan imbalan langsung yang dapat memberikan keuntungan bagi pembayar pajak.

Lain halnya dengan pemerintah, sebagai penerima pajak tentunya pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang tinggi karena merupakan pemasukan bagi negara. Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan perusahaan ini menyebabkan perusahaan melakukan berbagai cara untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang – undang perpajakan yang berlaku dan termasuk memilih metode akuntansi untuk mengurangi tarif pajak efektif (*Effective tax rate/ ETR*).

Para pembuat keputusan dan pihak – pihak yang berkepentingan menggunakan tarif pajak efektif perusahaan (*Effective tax rate/ETR*) sebagai salah

satu acuan dalam penetapan kebijakan suatu perusahaan dan memuat kesimpulan tentang sistem perpajakan perusahaan (Ardyansah, 2014). Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Karayan dan Swenson (2007) dalam Ardyansah (2014), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat persentase tarif efektifnya.

Berdasarkan *United States Government Accountability Office* tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*) berbeda dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak dan merupakan tarif pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam aturan perpajakan. Tarif pajak yang ditetapkan dalam aturan perpajakan ini dikenal dengan Statutory Tax Rate (STR). Sedangkan, tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi. Tarif pajak efektif (ETR) merupakan tarif pajak yang tidak ditetapkan dalam aturan perpajakan. ETR dapat membantu wajib pajak untuk mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya kita bayarkan untuk pajak, Handayani (2013).

Dalam sebuah perusahaan, keberadaan nilai *effective tax rate* (ETR) merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak, oleh karena itu berbagai penelitian memberikan perhatian secara khusus mengenai keberadaan nilai *effective tax rate* (ETR) karena dianggap dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan (Liansheng *et al.*, 2007). *Effective tax rate* (ETR) pada setiap perusahaan bersifat relatif, hal ini disebabkan adanya perbedaan pencatatan menurut akuntansi dengan pencatatan

menurut peraturan pajak (secara fiskal) dimana perbedaan tersebut bersifat sementara (*temporary*) maupun tetap (*permanent*).

Dua jenis utama dari ETR adalah tarif pajak efektif marjinal dan tarif pajak efektif rata-rata. Tarif pajak efektif marjinal mengukur pajak tambahan pada pendapatan tambahan, dan tarif pajak efektif rata-rata digunakan untuk mengukur dampak dari perubahan kebijakan pajak suatu negara pada beban pajak perusahaan (Mahenthiran, 2012). Selanjutnya, ETR rata-rata yang digunakan dalam penelitian merupakan ukuran penting dari beban pajak pada perusahaan bagi para pembuat kebijakan dan peneliti akademis selama beberapa dekade (Zimmerman, 1983).

Penetapan Tarif Pajak Efektif (*Effective tax rate/ ETR*) suatu perusahaan tidak terlepas dari campur tangan pemilik perusahaan. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor manajemen perusahaannya. Wenning (2007) dalam Sabrina (2010) menjelaskan salah satu struktur kepemilikan yang cukup besar dalam sebuah perusahaan adalah kepemilikan institusional dimana kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi meningkatkan dorongan institusi untuk melakukan monitor terhadap manajemen perusahaan, salah satunya dalam menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham

yang bertujuan untuk memberikan dorongan yang lebih besar sehingga dapat mengoptimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Kepemilikan perusahaan yang berada pada pihak manajemen (*managerial ownership*) menjadikan manajemen berperan sebagai pemilik dan pengelola. Peran ini menjadikan pihak manajemen akan lebih bertindak hati – hati dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya termasuk dalam perencanaan strategi pajak yang apabila tidak cermat dapat tersangkut ke jalur hukum yang berarti bahwa pihak manajemen akan ikut menanggung konsekuensinya. Pihak manajemen sebagai pemilik akan mampu mempengaruhi dan memotivasi karyawan untuk bekerja profesional dalam rangka mengurangi kewajiban perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial menunjukkan semakin kuatnya posisi manajemen untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan dan menyebabkan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer, Gunarsih (2004) dalam Sabrinna (2010).

Adanya perbedaan kepentingan yang terjadi diantara pihak – pihak yang terlibat dalam perusahaan merupakan masalah *corporate governance*. Konsep *Corporate governance* merupakan aturan yang menghasilkan suatu kepercayaan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*) yang nantinya pemilik akan percaya atas seluruh kegiatan yang dilakukan pihak manajemen. Cook et. al (2006) dalam Reza (2012) mengungkapkan bahwa adanya perubahan ETR dapat mengindikasikan adanya praktik manajemen laba yang dapat dilakukan dengan menekan beban pajak perusahaan. Untuk mencegah adanya praktik manajemen laba yang tentunya dapat merugikan pengguna informasi laporan keuangan, maka

dibutuhkan penerapan *corporate governance* yang termasuk di dalamnya dewan komisaris, komisaris independen dan dewan direksi.

Pengawasan dari *corporate governance* diperlukan agar tindakan penghematan pajak yang dilakukan pengelola perusahaan dalam rangka mengurangi tarif pajak efektif perusahaan tidak melanggar undang – undang yang berlaku. Apabila suatu perusahaan sudah menerapkan *corporate governance* dengan baik, maka diharapkan perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip dari *corporate governance*, seperti transparansi, dan akuntabilitas. Ukuran keberhasilan dari adanya penerapan prinsip *Good Corporate governance* adalah perusahaan memiliki suatu pengelolaan yang baik, sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan, dikendalikan (Lestari, 2013).

Indikator dari sistem *corporate governance* yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, komisaris independen dan dewan direksi. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas untuk menjamin terlaksananya strategi perusahaan dan memberkan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan (Bowo, 2014). Komisaris independen adalah orang – orang yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan yang merupakan posisi terbaik dalam pelaksanaan fungsi monitoring yang dapat bertindak sebagai penengah antara para manajer internal dan mengawasi kebijakan direksi. Sedangkan, dewan direksi bertugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan manajemen perusahaan dan bertanggungjawab menyusun laporan tahunan yang memuat laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan dan laporan pelaksanaan *corporate governance* yang pasti memperhatikan kelima prinsip-prinsip *corporate*

governance dalam bertugas mengelola perusahaan secara efektif dan efisien (Winarsih dkk, 2013). S.Beiner et al (2003) dalam Wulandari (2006) menyimpulkan bahwa jumlah dewan direksi mempengaruhi kinerja perusahaan dan ditegaskan pula bahwa dewan direksi merupakan mekanisme *corporate governance* yang penting, hal ini disebabkan karena dewan direksi dapat memastikan bahwa manajer mengikuti kepentingan pemegang saham.

Pemegang saham dan *stakeholder* mendapatkan perlindungan yang efektif melalui penerapan *corporate governance* yang diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik dapat diukur melalui laba yang diperoleh perusahaan, laba dikatakan berkualitas apabila laba mampu mencerminkan kelanjutan laba (*sustainable earnings*). Pemilihan keputusan yang tepat terkait dengan kegiatan perusahaan dapat mempengaruhi pencapaian laba perusahaan.

Pengambilan keputusan oleh perusahaan harus efektif, efisien dan tepat termasuk dalam penentuan kebijakan yang terkait tarif pajak efektif perusahaan. Besaran tarif pajak efektif perusahaan ditentukan oleh beberapa aspek perusahaan seperti dalam pemilihan metode akuntansi maupun adanya pengaruh langsung dari pemegang saham perusahaan. Suatu perusahaan yang telah menerapkan konsep *corporate governance* dengan baik dan benar maka akan menciptakan kinerja perusahaan yang efektif dan akan berdampak pada keputusan untuk yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan (Hanum, 2013).

Hasil penelitian yang telah dilakukan Derashid dan Zhang (2003) menyatakan bahwa adanya kepemilikan modal oleh pemerintah tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, selanjutnya Wulandari (2006) menemukan pada indikator mekanisme *corporate governance* dinyatakan jumlah dewan direktur, proporsi dewan komisaris independen tidak signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hanum (2013) dalam penelitiannya menyatakan adanya hubungan yang tidak signifikan antara *corporate governance* dengan ETR (*effective tax rate*), pernyataan ini diperkuat oleh penelitian Sabli dan Noor (2012) yang menemukan hubungan yang tidak signifikan antara *corporate governance* dan *corporate effective tax rate (CETR)*. Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah (2014) menemukan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate (ETR)*, kemudian Minnick dan Noga (2010) menyatakan bahwa *tax management* mempunyai hubungan yang signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan semakin berkembangnya sistem perpajakan, maka penulis ingin menguji bagaimana struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* mempengaruhi tarif pajak efektif (*effective tax rate / ETR*). Penelitian ini mengkaji secara khusus pengaruh salah satu komponen *corporate governance* yaitu struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* (ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi).

Penelitian ini juga menyesuaikan variabel yang cocok dengan karakteristik perusahaan di Indonesia, yaitu kepemilikan institusional dan

kepemilikan manajerial. Mekanisme tersebut dipilih dalam penelitian ini karena dianggap memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan *corporate governance*, dimana bertugas untuk mengendalikan dan menjalankan fungsi *monitoring* pada perusahaan secara langsung dan terlibat dalam penetapan tarif efektif perusahaan.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor manufaktur dikarenakan sektor manufaktur merupakan salah satu bagian sektor yang terbesar di Indonesia yang artinya merupakan wajib pajak badan yang cukup besar bagi negara. Pemilihan tahun 2010 – 2013 dianggap relevan dengan tahun dilakukannya penelitian karena menggambarkan profil perusahaan terkini dan tahun 2010 merupakan awal diberlakukan tarif pajak PPH badan dalam negeri sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang telah mengalami penurunan dari 28% (dua puluh delapan persen).

Penelitian ini berusaha menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance*, yang diproksikan dengan ukuran komisaris independen dan ukuran dewan direksi terhadap tarif efektif pajak (*effective tax rate/ ETR*) perusahaan.

1.2 Perumusan Masalah

Latar belakang yang telah diuraikan diatas menjadi dasar dalam perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor – faktor yang diduga mempengaruhi tarif pajak efektif (*effective tax rate/ ETR*) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI). Sesuai dengan tujuan tersebut, maka dijabarkan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
4. Apakah ukuran komisaris independen berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
5. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *effective tax rate*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta memberikan bukti – bukti secara empiris mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* terhadap tarif pajak efektif (*effective tax rate* /ETR) dengan :

1. Menguji Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *effective tax rate*
2. Menguji Pengaruh Kepemilikan manajerial terhadap *effective tax rate*
3. Menguji Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *effective tax rate*
4. Menguji Pengaruh ukuran komisaris independen terhadap *effective tax rate*
5. Menguji Pengaruh Ukuran dewan direksi terhadap *effective tax rate*

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, antara lain :

- a. Manfaat Teoritis: Menambah wawasan di bidang akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*) dan menambah referensi bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis : Membantu pihak yang berkepentingan untuk mengawasi dan turut berperan aktif dalam penetapan kebijakan pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab. Bab yang pertama berisi pendahuluan yang diuraikan dalam latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi telaah pustaka yang dilakukan. Bab ini berisi teori-teori dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian. Bab ini juga berisi kerangka pemikiran penelitian dan hubungan antar variabel dependen dan independen yang disajikan dalam hipotesis penelitian.

Bab ketiga berisi metode penelitian. Bab ini menjelaskan variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian serta metode pengumpulan data dan metode analisis penelitian.

Bab keempat merupakan hasil dan analisis penelitian yang diuraikan dalam deskripsi objek penelitian, analisis data serta interpretasi hasil penelitian.

Bab kelima yang merupakan penutup berisi kesimpulan tentang hasil penelitian. Dalam bab ini juga disebutkan keterbatasan penelitian yang ditemukan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1. Teori Agensi

Teori agensi yang dikembangkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling merupakan hal dasar untuk memahami konsep *corporate governance*. Jensen and Meckling (1976), menjelaskan bahwa *agency theory* merupakan teori yang menjelaskan adanya hubungan keagenan antara manajemen (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principal*), dimana wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun *principal* telah diatur dalam kontrak kerja bersama untuk pengambilan keputusan atas nama *principal*. Agen yang disebut sebagai pembuat keputusan mempunyai kontrak untuk melaksanakan tanggungjawab tertentu dan memberikan laporannya kepada pihak prinsipal, sedangkan prinsipal yang disebut sebagai penilai informasi mempunyai kontrak untuk memberikan upah kepada agen (Hendriksen, 2002).

Teori agensi mengasumsikan bahwa agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kondisi perusahaannya daripada prinsipal. Hal ini dikarenakan prinsipal tidak dapat mengamati kegiatan yang dilakukan agen secara terus-menerus dan berkala. Agen berkewajiban untuk memberikan informasi kepada prinsipal. Teori agensi memiliki asumsi bahwa setiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara

principal dan *agent*. Hal tersebut terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Eisenhardt (1989) berpendapat bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu :

1. Manusia pada umumnya cenderung mementingkan dirinya sendiri (*self interest*)
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*)
3. Manusia cenderung menghindari risiko (*risk averse*).

Berdasarkan pada asumsi dasar manusia tersebut, seorang manajer sebagai manusia cenderung akan bertindak mengutamakan kepentingan pribadinya yaitu dengan cara mendapatkan keuntungan dari pencapaian tanggungjawabnya dalam mengelola perusahaan.

Pihak agen sebagai pengelola dapat melakukan berbagai hal yang tidak menguntungkan perusahaan yang dalam jangka panjang dapat merugikan kepentingan perusahaan, hal ini dikarenakan pihak agen lebih banyak mengetahui informasi internal perusahaan. Sebaliknya, adanya keterbatasan pihak *principal* dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas *agent* sehari-hari untuk memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Kondisi seperti ini memicu timbulnya ketidakseimbangan informasi antara *principal* dan *agent* yang dinamakan dengan asimetri informasi.

Jensen dan Meckling (1976) beropini bahwa ada dua jenis asimetri informasi (*asymmetric information*), yaitu:

- a. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.
- b. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agent tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yaitu adanya wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* merupakan kesempatan bagi pihak agen untuk melakukan penghitungan penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetri informasi yang mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal, dimana dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memaksimalkan keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak prinsipal.

Untuk mengatasi masalah keagenan, maka dilakukan pengawasan yang intensif terhadap perilaku oportunistis agen dan kecenderungan menutupi informasi yang diberikan kepada pihak prinsipal untuk kepentingan agen sendiri yang disebut mekanisme *corporate governance*. Menurut penelitian Mudiastuty dan Machfoedz (2003) perlakuan manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik

kepentingan dapat diminimalisir melalui mekanisme monitoring yang bertujuan menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut, yaitu dengan :

1. Meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham dapat diselaraskan dengan kepentingan manajer.
2. Kepemilikan saham oleh investor institusi. Investor institusional dianggap sebagai pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar dan selain itu, investor institusional dianggap *sophisticated investors* yang tidak mudah “dibodohi” oleh tindakan manajer.
3. Melalui monitoring dewan direksi (*board of directors*). Beberapa penelitian empiris telah menunjukkan hubungan yang signifikan antara peran dewan direksi dengan pelaporan keuangan. Ditemukan bahwa ukuran dan independensi dewan direksi mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitoring proses pelaporan keuangan.

2.1.2 Tarif Pajak Efektif (*Effective tax rate* /ETR)

Effective tax rate dapat digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan pajak negara pada beban pajak perusahaan. *Effective tax rate* seringkali digunakan sebagai pengukuran efektivitas perencanaan pajak suatu perusahaan ataupun untuk mengukur penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Reza, 2012). Menurut pendapat Aunalal (2011) dalam Ardyansah (2014) *effective tax rate* dihitung berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *Effective tax rate* merupakan bentuk perhitungan tarif

pajak pada perusahaan. Sedangkan menurut Richardson dan Lanis (2007) tarif pajak efektif didefinisikan sebagai perbandingan antara pajak riil yang dibayar dengan laba komersial sebelum pajak. Dalam arti luas, *Effective tax rate* merupakan ukuran beban pajak perusahaan yang sebenarnya karena mengungkapkan tingkat pajak yang dibayar pada pendapatan perusahaan, Noor dkk (2010).

Effective tax rate bertujuan untuk mengetahui besar persentase perubahan dalam membayar pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh (Ardyansah, 2014). Menurut Richardson dan Lanis (2007), semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah *Effective tax rate* yang dimilikinya, hal ini disebabkan karena perusahaan mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik.

Melalui definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Effective tax rate* perusahaan-perusahaan pada dasarnya menilai kinerja pajak perusahaan. *Effective tax rate* merupakan ukuran terbaik untuk mengevaluasi beban pajak perusahaan yang sebenarnya karena seberapa baik manajemen pajak mengolah pajak perusahaannya dapat tercermin dari besaran tarif pajak efektif. Selain itu, tarif pajak efektif juga menunjukkan respon dan dampak insentif pajak terhadap sebuah perusahaan.

Dalam penelitian Mahenthiran (2012) ada dua jenis utama dari ETR yaitu :

1. *The marginal Effective tax rates* digunakan untuk mengukur pajak tambahan pada pendapatan tambahan

2. *The average Effective tax rate* digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan pajak suatu negara pada beban pajak perusahaan.

2.1.3 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan adalah komposisi besarnya kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan. Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Struktur kepemilikan terbagi dalam beberapa kategori. Secara spesifik kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik (Sabrinna, 2010). Struktur kepemilikan memiliki pengaruh dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya.

Selain itu, struktur kepemilikan juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan seringkali dapat menimbulkan konflik antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Apabila tidak terdapat perlindungan hukum yang memadai, pemegang saham pengendali dapat melakukan aktivitas yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemegang saham minoritas (Indriani, 2013). Menurut Jensen dan Meckling (1976), terdapat dua mekanisme *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

2.1.3.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi. Pemilik perusahaan yang merupakan institusi tertentu tentunya memiliki pengaruh yang lebih besar apabila dibandingkan dengan investor individual (Pratama, 2013). Keberadaan investor institusional memiliki arti penting dalam melakukan monitoring terhadap pihak manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal dan efektif dalam monitoring setiap keputusan yang diambil oleh manajemen termasuk kebijakan tentang pajak efektif perusahaan.

Dengan semakin meningkatnya kepemilikan institusional akan menimbulkan usaha monitoring yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Dengan adanya monitoring tersebut tentunya akan memberikan jaminan kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui besarnya investasi mereka dalam pasar modal. Wien Ika (2010) dalam Sartika (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

- 1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- 2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

2.1.3.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial menunjukkan adanya peran ganda seorang manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham yang merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan dan untuk mengurangi *agency cost* perusahaan. Tujuan diberikannya kesempatan manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham adalah untuk menyetarakan kepentingan dengan pemegang saham. Dengan meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dan mampu memberikan motivasi kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan.

Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang adalah dirinya sendiri. Dengan demikian, manajemen akan lebih meningkatkan kewaspadaan dalam menentukan kebijakan, termasuk kebijakan tentang tarif pajak efektif karena manajemen akan ikut merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang ditetapkan. Selain itu manajemen juga ikut menanggung kerugian apabila adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan.

2.1.4 *Corporate governance*

Menurut Forum for *Corporate governance* in Indonesia (FCGI) *Corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Tata kelola perusahaan tidak hanya memiliki definisi tunggal. Menurut Bursa Efek Indonesia (*Indonesia Stock Exchange*) Tata Kelola Perusahaan atau *Corporate governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. Khan (2010) dalam Perwira (2013) beropini bahwa mekanisme *corporate governance* digunakan sebagai cara untuk mengendalikan perusahaan agar bertanggungjawab atas arah perusahaan kepada pemegang saham. Minnick dan Noga (2011) berpendapat bahwa *corporate governance* memainkan peran yang sangat *essential* dalam manajemen pajak, dimana perusahaan dengan struktur *governance* yang berbeda akan memilih strategi penghematan pajak yang berbeda yang tercermin dari nilai ETR perusahaan.

Di Indonesia, Code Of Good *Corporate governance* yang diterbitkan oleh Komite Nasional *Corporate governance* terdapat 5 prinsip yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan, yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi)

Perusahaan dalam menjalankan bisnis harus bersedia memberikan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan efektif.

3. *Responsibility* (pertanggung jawaban)

Pertanggungjawaban suatu perusahaan dapat terlihat dari kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.

4. *Independency* (kemandirian)

Perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan sistem, proses dan seperangkat aturan yang digunakan untuk menghubungkan perusahaan dengan *stakeholdernya* demi tercapainya tujuan

perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan sama kedudukannya dengan struktur kepemilikan, dimana memberikan pengaruh pada pengendalian termasuk mempersempit perbedaan kepentingan prinsipal dan agen.

2.1.4.1 Dewan Komisaris

Berdasarkan FCGI (Forum for *Corporate governance* in Indonesia), dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan, khususnya dalam pelaksanaan *corporate governance*, karena berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris adalah suatu mekanisme pengawasan dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan.

Dalam *corporate governance*, dewan komisaris dapat membentuk komite yang membantu pelaksanaan fungsi dewan komisaris agar berjalan secara efektif (Hanas, 2009). Dengan membentuk komite – komite, Dewan komisaris dapat melakukan tugasnya sendiri maupun dengan mendelegasikan kewenangannya pada komite yang bertanggungjawab pada dewan komisaris.

Tugas utama dewan komisaris adalah melakukan pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108 ayat (5) menjelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Komisaris

2.1.4.2. Komisaris Independen

Indonesia menganut sistem *two tire*, dimana fungsi dewan direksi dan dewan pengawas dipisah. Pihak yang berperan untuk memediasi hubungan antara manajer, auditor, dan pemegang saham disebut pihak komisaris independen (Wulandari, 2006). Komisaris independen didefinisikan sebagai anggota Komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris independen diangkat oleh perusahaan untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham apabila terjadi konflik.

Independen yang dimaksud dalam hal ini artinya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh komisaris yang tidak memihak kepada siapapun. Objektivitas yang dijunjung tinggi disini menjadikan pihak komisaris independen sebagai pemangku kepentingan yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap perusahaan (Rahadian, 2014). Di Indonesia, BAPEPAM-LK mengatur bahwa sekurang-kurangnya satu orang dalam dewan komisaris adalah pihak independen (BAPEPAM, 2004). Bursa Efek Indonesia mengeluarkan peraturan yang lebih ketat bahwa minimal 30% dari jumlah komisaris adalah independen. Sedangkan Pedoman *Good Corporate governance* perusahaan tidak menentukan tentang jumlah minimal komisaris independen (KNKG, 2006).

2.1.4.3 Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan yang dipilih sebagai perwakilan para pemegang saham dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas melakukan pelaksanaan operasi dan kepengurusan perusahaan serta menentukan kebijakan atau strategi yang diambil untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Dewan direksi memiliki peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan. Menurut Undang-Undang Pereseroan Terbatas (UUPT) Pasal 97 ayat (2), setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas secara tersurat diatur mengenai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dewan direksi. Dalam undang-undang ini, dewan direksi memiliki tugas antara lain:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan manajer.
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan

Anggota dewan direksi diangkat oleh dewan komisaris. Jumlah anggota dewan direksi yang dimiliki oleh perusahaan berbeda – beda yang sesuai dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait *corporate governance* dan tingkat efektivitas pajak yang dibayarkan perusahaan atau *Effective tax rate* (ETR) telah banyak dilakukan sebelumnya, akan tetapi di setiap penelitian terdapat perbedaan faktor diteliti dan hasil penelitiannya pun juga berbeda. Hal tersebut yang menjadi acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya, dan tabel 2.1 menunjukkan beberapa diantaranya :

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Data dan Alat Statistik	Hasil
1.	Derashid dan Zhang (2003)	Variabel Independen: ukuran perusahaan, hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, kepemilikan modal oleh pemerintah dan tahun pajak Variabel dependen: <i>Effective tax rate</i> (ETR)	474 Perusahaan periode 1990 - 1999 <i>analysis regression</i>	Hasil regresi linier variabel independen menunjukkan hasil variabel ukuran perusahaan, hutang perusahaan, intensitas aset tetap, Intensitas persediaan dan perbandingan nilai buku berpengaruh terhadap <i>Effective tax rate</i> sedangkan kepemilikan modal oleh pemerintah tidak berpengaruh terhadap <i>Effective tax rate</i>
2.	Sabli dan Noor (2012)	Var. Independen: <i>Proportion of independen directors, Institutional investors</i>	397 perusahaan periode 2007 - 2010 <i>The</i>	Hasil regresi linier menunjukkan hasil proporsi dewan komisaris independen dan investor institusional tidak

		Variabel Dependen: <i>Effective tax rate (ETR)</i> Variabel Kontrol: <i>Firm size, leverage ratio, return on asset (ROA) and capital intensity ratio</i>	<i>Multivariate Regression Models, Univariate tests</i>	berpengaruh terhadap <i>Effective tax rate</i>
3.	Mahenthiran (2012)	Var Independen : Kepemilikan Pemerintah, kepemilikan Manajerial, Kompensasi Manajemen Variabel dependen: <i>Effective tax rate (ETR)</i>	345 perusahaan periode 2006 - 2008 Analisis Regresi	Hasil regresi linier menunjukkan hasil kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial dan kompensasi manajemen berpengaruh terhadap besaran <i>Effective tax rate</i>
4.	Hanum (2013)	Var.Independen: komisaris Independen, komite audit dan inverstor institutional Variabel Dependen: <i>Effective tax rate (ETR)</i>	50 perusahaan periode 2009 - 2011 Analisis regresi berganda	Hasil regresi linier menunjukkan hasil independen yaitu komisaris independen, komite audit dan investor institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen <i>Effective tax rate</i>

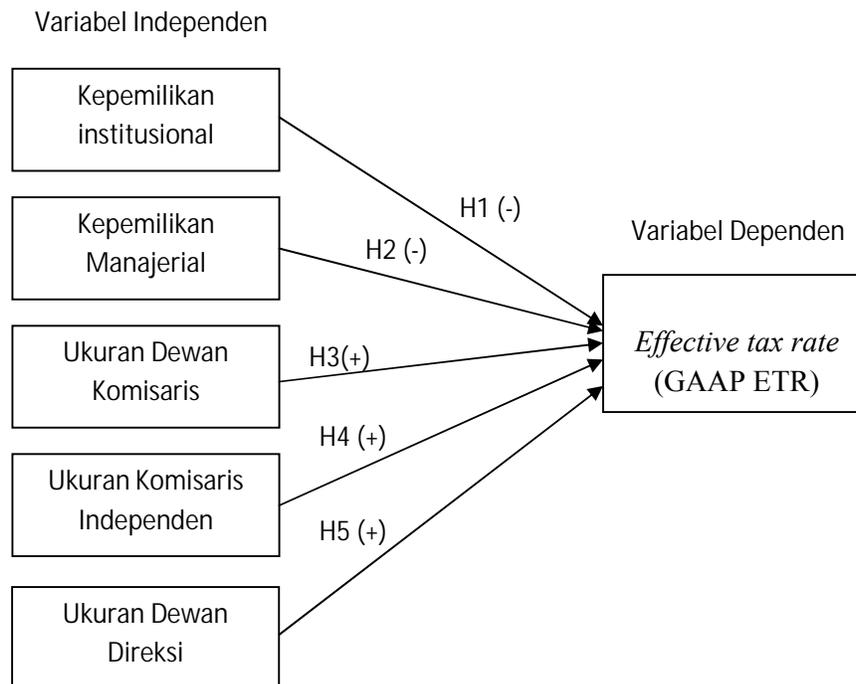
2.1 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* terhadap *Effective tax rate (ETR)*. Struktur kepemilikan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, kemudian mekanisme *corporate governance* pada penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran dewan

direksi. Selain menguji secara parsial, penelitian ini juga melakukan pengujian secara simultan. Kerangka pemikiran yang disusun berdasarkan uraian teoritis akan menjelaskan bagaimana struktur kepemilikan dan mekanisme tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi *Effective tax rate* (ETR) suatu perusahaan yang dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.2 Perumusan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Effective tax rate* (ETR)

Kepemilikan Institusional merupakan proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh pihak Institusi ataupun lembaga dalam penelitian ini lembaga keuangan. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam melakukan monitoring manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal dan mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil manajer. Hal ini disebabkan investor institusional ikut terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba, (Sartika, 2012).

Berdasarkan teori agensi, penting bagi pemilik perusahaan untuk menyerahkan pengelolaan kepada agen karena dianggap lebih mengerti cara menjalankan usaha. Akan tetapi, proporsi yang lebih besar dari kepemilikan institusional di perusahaan tertentu menjadikan semakin kuat mereka dalam mempengaruhi keputusan manajemen dalam keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. Sabli dan Noor (2012) mengungkapkan kepemilikan institusional yang besar menandakan tugas mereka tidak hanya sebagai pemilik, *tetapi* juga sebagai monitor untuk mengawasi pekerjaan dalam manajemen. Investor pada dasarnya menginginkan laba setinggi - tingginya sehingga akan menyebabkan pembagian deviden yang cukup tinggi dengan cara memantau secara profesional perkembangan investasi yang ditanamkan pada perusahaan.

Namun, kemampuan memperoleh laba yang tinggi berarti harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh (Ardyansah, 2014). Untuk itu, Investor melakukan intervensi bagi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan, karena mengurangi beban pajak merupakan salah satu cara untuk memperoleh laba yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa investor institusional memiliki tingkat pengendalian yang tinggi terhadap tindakan manajemen yang dapat memperkecil potensi manajemen untuk melakukan kecurangan yang merugikan pemegang saham. Terdapatnya andil kepemilikan institusional dalam penetapan kebijakan pajak efektif memberikan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Effective tax rate* (ETR)

2.2.2 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Effective tax rate* (ETR)

Kepemilikan manajerial merupakan presentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Salah satu cara untuk mengurangi konflik antara pemilik dengan pengelola perusahaan adalah dengan memperbesar kepemilikan manajerialnya. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat menyelaraskan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham, hal ini dikarenakan posisi manajer sebagai agen dan juga berperan sebagai prinsipal.

Berdasarkan teori keagenan pemilik saham memiliki keinginan untuk mendapatkan *return* yang tinggi, dan manajer perusahaan mendapat kompensasi atas kinerjanya mengakibatkan para manajer melakukan tindakan oportunistik untuk melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi besaran pajak yang dibayarkan perusahaan. Kepemilikan manajerial yang rendah akan meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer dalam perusahaan, sementara dengan semakin meningkatnya kepemilikan saham pihak manajerial maka diharapkan akan semakin baik kinerja perusahaan, karena mereka juga memiliki perusahaan (Krisnauli, 2014).

Manajer yang berperan sebagai pemilik dan pengelola akan bertindak lebih hati – hati dalam pengambilan keputusan khususnya dalam menentukan strategi pajak karena akan ikut menanggung konsekuensi yang diterima perusahaan. Sebagai pemilik dan pengelola perusahaan manajer memiliki kesamaan kepentingan dengan perusahaan yaitu meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, untuk itu manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Dalam rangka menekan biaya seoptimal mungkin, manajer akan memotivasi dan mempengaruhi karyawan untuk mengelola kewajiban pajak perusahaan. Pengelolaan kewajiban pajak tersebut sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen di suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *Effective tax rate (ETR)*

2.2.3 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Effective tax rate* (ETR)

Dewan komisaris dalam urutan manajemen menduduki tingkatan tertinggi setelah pemegang saham. Dewan komisaris memegang peranan sentral dalam *corporate governance* karena hukum perseroan memusatkan tanggung jawab legal atas urusan perusahaan pada dewan komisaris. Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi *monitoring* dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham.

Dewan Komisaris berperan sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance* dengan baik termasuk melalui pengawasan terhadap tindakan manajemen yang memungkinkan manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif (Winarsih, dkk, 2012). Menurut perspektif teori, semakin meningkatnya dewan komisaris dapat mencegah perusahaan melakukan usaha yang agresif dalam rangka memperkecil tarif pajak efektif, sehingga perusahaan akan lebih berhati – hati melakukan aktivitasnya, khususnya terkait dengan aturan perpajakan.

Setiap perusahaan memiliki jumlah optimal dewan komisaris yang berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris semakin banyak dan akan meningkatkan pengawasan. Hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan akan

semakin banyak membutuhkan penasihat (Meilinda,2013). Minnick dan Noga (2010) menjelaskan bahwa jumlah dewan komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak, khususnya diharapkan akan menurunkan tarif pajak efektif perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Effective tax rate* (ETR)

2.2.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Effective tax rate* (ETR)

Teori keagenan mendukung ide bahwa seharusnya independensi dewan didominasi oleh dewan yang berasal dari luar, dalam hal ini dimaksudkan adalah dewan komisaris independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai saham dalam perusahaan, dan tidak mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Komisaris independen melakukan pengarahan dan pengawasan agar tidak terjadi asimetri informasi yang sering terjadi antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen).

Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan kebijakan yang menguntungkan perusahaan akan tetapi tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pajak. Berdasarkan penelitian Sabli dan Noor (2010) disimpulkan bahwa komisaris independen melakukan monitoring yang sangat baik dengan

mengarahkan perusahaan kepada aturan yang telah ditetapkan. Ardyansah (2014) menjelaskan bahwa proporsi komisaris independen yang semakin besar akan memberikan pengawasan kepada agen menjadi semakin ketat dan dapat berpengaruh pada beban pembayaran pajak yang lebih tinggi atau sesuai dengan perautran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan komisaris independen akan memberikan tekanan yang lebih kepada perusahaan untuk melaporkan jumlah pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4: Ukuran Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Effective tax rate (ETR)*

2.2.5 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap *Effective tax rate (ETR)*

Dewan direksi adalah orang yang diberikan tugas untuk mengelola dan mewakili perusahaan. Dewan direksi memainkan peranan penting dalam menentukan strategi manajemen pajak. Besar kecil atau ukuran dewan direksi mempengaruhi bagaimana proses operasional perusahaan. Dewan direksi bertanggungjawab dalam penyusunan laporan tahunan yang memuat laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan dan laporan pelaksanaan *corporate governance* (Winarsih dkk, 2013). Dewan direksi juga bertanggungjawab atas alokasi sumber daya dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Dewan direksi berperan dalam menentukan bagaimana sumber daya ini dialokasikan dalam rangka memaksimalkan kinerja perusahaan.

Winarsih, dkk (2012) yang menemukan bahwa perusahaan lebih memikirkan dampak yang akan diterima oleh perusahaan ketika melakukan tindakan penurunan tarif pajak yang apabila terdeteksi akan memungkinkan terjadinya sanksi atau penalti dari fiskus pajak dan bahkan menyebabkan hancurnya reputasi perusahaan. Selain itu, keberadaan dewan direksi mampu mengurangi permasalahan dalam teori keagenan serta mampu benturan kepentingan dalam perusahaan. Jika benturan kepentingan dalam perusahaan bisa diminimalisir dengan adanya dewan direksi, maka prinsip-prinsip dalam *corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran akan terpenuhi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap *Effective tax rate* (ETR)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasi

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang terdiri dari variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variabel*). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *effective tax rate* (ETR) yang diprosikan dengan GAAP ETR. Variabel independen merupakan variabel yang diduga dapat mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi.

Tabel 3.1

Variabel, Dimensi, Indikator dan Skala Pengukuran

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
<i>Effective tax rate</i> (Y)	GAAP ETR	$\frac{\text{Jumlah beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$	Skala Rasio
Kepemilikan Institusional (X)	Laporan Tahunan Perusahaan 2010- 2013	$\frac{\text{lembar saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$	Skala Rasio

Kepemilikan Manajerial (x)	Laporan Tahunan Perusahaan 2010- 2013	$\frac{\text{lembar saham milik manajerial}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$	Skala rasio
Ukuran Dewan Komisaris (X)	Laporan Tahunan Perusahaan 2010- 2013	Ukuran dewan komisaris = Jumlah anggota dewan komisaris perusahaan	Skala interval
Ukuran Dewan Komisaris Independen (X)	Laporan Tahunan Perusahaan 2010- 2013	$\frac{\Sigma \text{ Komisaris independen}}{\Sigma \text{ Anggota Dewan komisaris}}$	Skala rasio
Ukuran Dewan Direksi (X)	Laporan Tahunan Perusahaan 2010- 2013	Ukuran Dewan Direksi = Jumlah anggota dewan direksi perusahaan	Skala interval

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi ataupun yang menjadi dampak karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *effective tax rate (ETR)*. *Effective tax rate* semakin baik

apabila nilai *effective tax rate* semakin rendah. Secara sistematis nilai *effective tax rate* dapat dihitung dengan :

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Jumlah beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Keterangan :

GAAP ETR = Tingkat Pajak Efektif

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel independen adalah struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governanace* yang terdiri dari: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, dan ukuran dewan direksi.

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional berarti persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi. Variabel kepemilikan institusional ini, dapat diukur dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional. Pengukurannya sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{lembar saham yang milik institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \times 100\%$$

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial dimana para manajer memiliki saham atas perusahaan. Hal ini berarti bahwa posisi manajer sebagai agen dan juga

sebagai prinsipal. Variabel kepemilikan manajerial ini diukur dengan presentase kepemilikan yang dimiliki oleh pihak manajemen. Pengukurannya sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{lembar saham yang dimiliki manajerial}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \times 100\%$$

3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Pengukurannya sebagai berikut :

Ukuran dewan komisaris = Jumlah anggota dewan komisaris perusahaan

4. Ukuran Komisaris Independen

Komisaris independen melakukan mengarahkan dan mengawasi agar tidak terjadi asimetri informasi yang sering terjadi antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). Ukuran komisaris independen yang dimaksud dalam penelitian ini pengukurannya sebagai berikut :

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\Sigma \text{Komisaris independen}}{\Sigma \text{Anggota Dewan komisaris}} \times 100\%$$

5. Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan orang yang diberikan mandat untuk menjalankan operasional di dalam perusahaan. Ukuran dewan direksi yang

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jumlah dewan direksi yang dimiliki dalam suatu perusahaan. Pengukuran dewan direksi dapat ditulis sebagai berikut:

Ukuran Dewan Direksi = Jumlah anggota dewan direksi perusahaan.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dengan metode *non – probability*. Kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang secara berturut-turut menyediakan laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2013;
2. Perusahaan manufaktur tersebut tidak *delisting* selama periode pengamatan;
3. Tidak memiliki laba yang negatif/rugi. Perusahaan yang mengalami rugi berarti tidak menanggung beban pajak. Apabila ada beban pajak, merupakan beban pajak tahun berjalan;
4. Perusahaan manufaktur tersebut mengungkapkan informasi tentang tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dalam annual report, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komisaris independen, dan dewan direksi pada tahun 2010-2013.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan. Data sekunder dapat diperoleh dari *Annual Report* (laporan tahunan), Indonesia Capital Market Directory (ICMD), dan mengakses website BEI (www.idx.co.id).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara membaca, mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sampel yang diambil menggunakan metode *non – probability sampling* dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Pengujian statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai *mean*, maksimum, minimum dan standar deviasi. Dengan menggunakan statistik deskriptif data dapat tersaji dengan ringkas sehingga dapat terlihat ukuran persebaran datanya normal atau tidak.

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi hubungan antara struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* terhadap *effective tax rate* (ETR). Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{GAAP ETR} = \alpha_0 + \beta_1 \text{KEPINS} + \beta_2 \text{KEPMAN} + \beta_3 \text{DEKOM} + \beta_4 \text{KOMINDP} + \beta_5 \text{DEDIR} + \epsilon_i$$

Keterangan :

GAAP ETR = Tingkat pajak efektif (proksi dari ETR)

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3,4,5}$ = Koefisien regresi

KEPINS = Presentase Kepemilikan Institusional

KEPMAN = Presentase Kepemilikan Manajerial

DEKOM = Ukuran Dewan Komisaris

KOMINDP = Ukuran Komisaris Independen

DEDIR = Ukuran Dewan Direksi

ϵ_i = *error term*

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji kenormalan distribusi variabel pengganggu atau residual. Menurut Ghozali (2011) ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan cara analisa grafik dan analisa statistik. Pada penelitian ini akan digunakan analisis grafik.

Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, *ploting* dan *residual* yang akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arahgaris diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusinormal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2013)

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data *residual* terdistribusi tidak normal (Ghozali,2013).

3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Salah satunya adalah dengan melihat pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara residualnya dengan variabel terikat. Ghozali (2013) menjelaskan bahwa gambar *Scatterplot* menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat heteroskedastisitas jika:

- a. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- d. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.

3.5.3.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Menurut Ghozali (2013) cara yang dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel independen adalah dengan melihat nilai *tolerance* yaitu mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya dan lawannya, *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai *VIF* ≥ 10 .

3.5.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2013). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem autokorelasi*. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena *residual* (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2013).

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan Uji *Durbin-Watson (DW test)*. Pada penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson (DW test). Jika d lebih kecil dibandingkan dengan dl atau lebih besar dari $4-dl$, H_0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Jika DW terletak di antara DU

Autokorelasi Positif	Daerah Ragu-Ragu	Tidak Ada Autokorelasi	Daerah Ragu-Ragu	Autokorelasi Negatif
0	dl	Du	$4-du$	$4-dl$

dan $4-DU$, berarti tidak terjadi autokorelasi.

Keterangan :

dl : Nilai batas bawah tabel Durbin Watson

du : Nilai batas atas tabel Durbin Watson

Selain Uji *Durbin Watson*, mendeteksi autokorelasi dapat menggunakan *run test*. *Run test* sebagai bagian dari statistik non-parametrik digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi (Ghozali, 2013)

3.5.4 Pengujian Hipotesis

3.5.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berada di antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen

(Ghozali, 2013). Dapat juga dikatakan bahwa $R^2=0$ berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sedangkan $R^2=1$ menandakan suatu hubungan yang sempurna.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Penolakan atau penerimaan hipotesis berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 maka semua variabel independen (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan dewan direksi) secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen (*effective tax rate*).

2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka semua variabel independen (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan dewan direksi) secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (*effective tax rate*).

3.5.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen

(Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan dengan mengukur nilai probabilitas signifikansi. Penolakan atau penerimaan hipotesis berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 menyatakan bahwa secara *partial* variabel independen (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan dewan direksi) berpengaruh terhadap variabel dependen (*effective tax rate*).

2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 menyatakan bahwa secara *partial* variabel independen (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan dewan direksi) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (*effective tax rate*).